

PERGESERAN KEPEMIMPINAN *ULAMA* MENJADI *UMARA*' DALAM SISTEM DEMOKRASI POLITIK LOKAL KABUPATEN PAMEKASAN DAN SUMENEP MADURA

Oleh:
Nurul Azizah¹

Abstrak:

Runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter dan penerapan otonomi daerah yang tidak lagi sentralistik telah menandai adanya perubahan politik yang sangat radikal di republik ini. Perubahan ini tentunya juga berimbas pada mekanisme kepemimpinan di tingkat lokal seperti yang terjadi di masyarakat Madura. Faktor perubahan rezim ini juga ditambah dengan dibangunnya jembatan Suramadu sehingga masyarakat Madura semakin terbuka melakukan akses dengan dunia luar baik secara ekonomi maupun sosial-budaya. Pada masa Orde Baru, pengalaman politik masyarakat Madura sangat bergantung pada Kiai sebagai akibat dari otoritarianisme penguasa. Di masa kejayaan Golkar sebagai *the ruling party*, mayoritas kiai di Madura mengambil jarak dengan kekuasaan dan membangun orientasi sosial keagamaan sepenuhnya pada masyarakat. Setelah perubahan rezim, para kiai yang sebelumnya menjadi tokoh non-formal menjelma menjadi penguasa (Bupati). Ironisnya, setelah lima tahun rezim kiai memimpin tampuk pemerintahan di sebagian besar kabupaten di Madura, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menciptakan perubahan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: politik lokal, perubahan, kepemimpinan, masyarakat.

A. Pendahuluan

Perubahan politik sangat radikal yang terjadi di Indonesia ditandai oleh runtuhnya Orde Baru yang menerapkan sistem politik otoritarian, dan `sentralistik berubah menjadi desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Konsekuensi dari semua itu antara lain adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan suatu proses politik untuk memilih para kepala daerah secara langsung yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004

¹ Saat ini menempuh Program Doktor di Uneversitas Airlangga Surabaya, dan aktif sebagai Dosen Fakultas Dakwah IAI Ibrahimiy Sukorejo Situbondo Jawa Timur.

tentang pemerintahan daerah. Perubahan politik lokal juga berdampak pada demokratisasi tingkat lokal.

Demokrasi menjadi suatu hal yang penting dan menjadi barang mahal untuk dilaksanakan. Setelah dihadapkan pada persoalan politik nasional yaitu pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, kini dihadapkan pada persoalan politik lokal yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini merupakan khasanah baru dalam politik lokal.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah memberikan harapan dan peluang bagi daerah itu sendiri sekaligus kepada rakyat untuk dapat mengekspresi diri. Artinya daerah diberi peluang untuk memunculkan tokoh lokal tidak terkecuali ulama atau seorang kyai yang mempunyai kharisma.

Kekurangsigapan Kyai dalam merespons perubahan sosio-politik-kultural biasanya akan segera dituding sebagai terlalu menonjolnya tradisionalisme bawaan dalam berhadapan dengan modernisme dan rasionalitas birokrasi sebagai sesuatu hal yang baru. Pada awal bagian ini peneliti akan mencoba untuk melihat bagaimana dalam konteks makro politik di Madura, ulama dan umara mengartikulasikan peranannya. Ulasan mengenai bagian ini penting guna melihat rancang-bangun politik di masa awal kandidat umara’, situasi psikologis dan sosiologis, sebelum masuk pada bagian kedua dari paparan data ini.

Pada bagian pertama akan dielaborasi lebih jauh mengenai akar dan historisitas dari dinamika dua identitas, yakni ulama dan umara dalam konteks makro politik lokal di Madura. Sebagai konsekuensi dari praktik desentralisasi politik, maka dimensi lokalitas dalam politik di Madura mengemuka sebagai suatu hal yang baru—sekurang-kurangnya jika dibandingkan dengan praktik politik di masa Orde Baru. Situasi ini memunculkan sekaligus menegaskan peran dari konfigurasi aktor-aktor sosio-politik lokal. Salah satu yang sangat menonjol peranannya tiada lain adalah kyai. Fathol Haliq mencatat sekurang-kurangnya dua momentum penting yang menjadi kekuatan konsolidasi politik, sosial, sekaligus budaya di Madura: keruntuhan Orde Baru pada 1998 dan beroperasinya jembatan Suramadu pada 2009. Jembatan sepanjang 5,438 meter merupakan penghubung dua pulau yang terpanjang se-Asia Tenggara menghabiskan dana Rp. 3,4 trilyun.² Perubahan relasi kuasa terjadi pada

² Periksa Fathol Haliq, *Islam Madura: Studi Konflik, Adaptasi, Harmoni Kelas Menengah Madura Setelah Keruntuhan Orde Baru*, kumpulan makalah dari Annual

Orde Baru tatkala sentrum kekuasaan digeser ke pinggir melalui mekanisme otonomi daerah, sementara Jembatan Suramadu merepresentasikan keterbukaan ekonomi dan dengan demikian mengubah konfigurasi kekuasaan pula disana.

Pada bagian selanjutnya, akan dielaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana dalam konteks spesifik Sumenep dan Pamekasan terjadi pergeseran posisi sekaligus fungsi antara ulama menuju umara'. Konteks Sumenep dan Pamekasan dipilih karena kedua Kabupaten tersebut bukan saja menunjukkan performa politik sekaligus ekonomi yang terbilang baik di pulau Madura, melainkan juga karena keduanya dipimpin oleh pemimpin Bupati dengan latar belakang Kiai.

B. Pergeseran Tipe Kepemimpinan (Ulama, Umara' dan Politik Madura dalam Konteks Makro)

Menilik sejarah Islam Indonesia, kita dapat melihat bahwa Islam masuk dan menyebar di Jawa dan Madura nyaris tanpa ada ketegangan dan konflik.³ Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian, sekalipun kala itu masyarakat sudah mempunyai sistem kepercayaan tersendiri, baik berupa animisme maupun agama Hindu-Budha.

Ada beberapa hal yang digunakan sejarawan untuk mendukung tesis tersebut. *Pertama*, kepatuhan orang Jawa dan Madura kepada pemimpin agama, politik, dan ekonomi yang relatif tanpa sikap kritik dan kontrol menyebabkan penyebaran Islam berjalan dengan mulus tanpa ketegangan. Sebab, penyebaran Islam selain dilakukan oleh pemimpin agama, juga dinahkodai oleh pemimpin politik dan ekonomi. Bahkan, para wali sendiri merupakan elite politik dan ekonomi yang mampu menembus relung-relung kebudayaan dan orang Jawa dan Madura.⁴

Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1 - 4 November 2010 (ACIS) Ke - 10 , hlm 404

³ Beberapa sejarawan sepakat mengenai hal ini, satu di antaranya sejarawan Taufik Abdullah (1992). Namun dikatakan M. Ali al-Humaidy, hal ini masih perlu kajian lebih lanjut karena beberapa kenyataan yang terlihat dalam kebudayaan Tengger, Bakaran, dan Kanekes, masih menunjukkan resistensi kulturalnya hingga sekarang. Selengkapnya lihat, M. Ali al-Humaidy, "*Tradisi Molodhan: Pemaknaan Kontekstual Ritual Agama Masyarakat Pamekasan, Madura*", dalam Jurnal ISTIQRO', Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Volume 06, Nomor 01, 2007. hlm.. 278.

⁴ M. Ali al-Humaidy, "*Tradisi Molodhan...*" hlm. 278. H.J. de Graff, menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara mengenal tiga cara utama, yaitu melalui perdagangan, pendakwah sufi, dan politik. Sebagaimana mafhum, Islam bisa menyebar

Kedua, adanya unsur kesamaan antara ajaran Islam yang bernuansa sufistik dan ilmu kebatinan Jawa.⁵ *Ketiga*, proses penyebaran Islam melewati jalan kultural. Para pendakwah Islam dulu, memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang *heterogen setting* nilai budayanya. Wali Songo dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, melainkan dalam racikan dan kemasan bercita rasa Jawa. Artinya, masyarakat diberi “bingkisan” yang dibungkus budaya Jawa tetapi dengan substansi Islam.⁶

Beberapa *snapshot* historis tersebut menjadi latar belakang yang berkontribusi dalam konstruk dinamika politik dan budaya lokal hingga kini di Madura. Sejarah panjang kemunculan elite penguasa Madura berlatarbelakang status religiusitas mejadi latar belakang yang akan mengantarkan peneliti untuk masuk pada orientasi dan pergeseran ulama menuju umara’ di Sumenep dan Pamekasan pada masa sekarang. Titik berangkat yang sangat baik ditulis oleh studi Fathol Haliq.

Fathol Haliq dalam studi etnografi-politiknya mencatat fenomena menarik tatkala terjadi keterputusan doktrin-dogmatik agama dengan perilaku elite—yang notabene berlatarbelakang Kiai. Beberapa kesaksian dikutip untuk menunjukkan keterangan, pemikiran, maupun sikap politik termasuk kritisisme didalamnya, dari tokoh dan pejabat teras institusi keagamaan yang menjadi bagian dari pengalaman *abuse of power* umara’ disana. Dalam beberapa hal, Kyai yang banyak terlibat dalam persoalan-

dengan cepat di Jawa cenderung dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan pascakerajaan Majapahit serta berdirinya kerajaan Demak selanjutnya oleh Pajang dan Mataram. Proses perubahan kekuasaan tersebut juga berpengaruh pada kepegangan agama masyarakatnya. Sebab, dalam hal ini berlaku pepatah, “*cuius regio, eius regio*”, yang berarti agama raja adalah agama rakyatnya. Telaah, H.J. de Graff, “*Islam di Asia Tenggara Sampai Abad ke-18*”, dalam Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982), hlm.. 2

⁵ Menurut Ahmad Baso, setidaknya kehadiran Islam tidak mengusik kepercayaan lama, tetapi sebaliknya kepercayaan tersebut diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam. Karena kemampuan berdialog dan melakukan tawar-menawar dengan kebudayaan setempat itulah yang menyebabkan agama Islam secara umum bisa berkembang dengan pesat tanpa menemukan benturan yang berarti dengan kepercayaan, tradisi dan budaya yang ditemui. Lihat, Ahmad Baso, “*Asyura dan Karakter Islam Nusantara*” dalam <http://konspirasi.com/peristiwa/asyura-dan-karakter-islam-nusantara/> diakses pada Maret 2011

⁶ Anjar Nugroho, “*Gagasan Pribumisasi Islam: Meretas Ketegangan Islam dengan Kebudayaan Lokal*”. Makalah, tidak diterbitkan.

persoalan pemerintahan justru kehilangan peran tradisionalnya sebagai pelindung dan pengayom, serta bertransformasi menjadi alat bagi permainan birokrat.

Aksentuasi postulat di atas dapat dibandingkan dengan hasil rilis Investigasi Lakpesdam NU Sumenep yang memaparkan lemahnya pengendalian dana APBD sehingga terlampau banyak bergulir dalam internal birokrasi dan tak berhasil diserap ke level riil atau implementasi. Bahkan ditemukan sejumlah indikasi terjadinya penyelewengan alokasi dana bantuan dan dana insidental pada kalangan birokrasi. Simak kesaksian berikut sebagaimana peneliti kutip dari studi Fathol Haliq:

"Ketika saya menghadap kepada staf Kepala Dinas, tiba-tiba datang ajudan untuk menyatakan sesuatu. Ya, untuk menyenangkan bupati berilah lima puluh juta untuk Bazar Sembako Murah. Ambil beberapa kantong beras, gula dan minyak goreng. Terserah sampeyan! begitu kata Kepala Dinas tersebut. Penasaran, hari Sabtu saya mendatangi Bazar Sembako dinas tersebut. Sungguh saya saksikan –warung kecil– 3 x4 dengan beberapa bungkus sembako dianggarkan 50 juta. Sungguh ironis!"⁷

Kritisisme dari kutipan di atas sekedar contoh untuk menggambarkan keterputusan status religius dalam hubungannya dengan dinamika politik lokal. Keterputusan itu terjadi tatkala tak lagi ditemui padanan peranan dan fungsi Kiai dalam dunia birokrasi, sekalipun subjek yang dimaksudkan tidak berubah sama sekali melainkan hanya berubah fungsi. Disfungsi Kiai dalam politik inilah yang nanti juga akan dilihat dalam riset disertasi peneliti.

Pada masa Orde Baru, pengalaman politik publik bergantung pada Kiai sebagai akibat dari ketidakpuasan atas Golkar.⁸ Paksaan birokrasi dan aparat keamanan negara memaksa publik agar mencoblos gambar partai yang berlambang pohon beringin tersebut memaksa publik Madura memfokuskan sekaligus memasrahkan sikap politiknya kepada alternatif lain. Di tengah represi-paksa state apparatus, suatu upaya resistensi berbasiskan arus kekuatan politik lokal sebagai alternatif dengan memilih parpol yang di dalamnya dihuni pelbagai subjek yang memiliki platform

⁷ Dikutip dari studi etnografi Fathol Haliq, di atas adalah wawancara dengan salah satu pengurus teras Nahdlatul Ulama Madura, *Islam Madura: Studi Konflik, Adaptasi, Harmoni Kelas Menengah Madura Setelah Keruntuhan Orde Baru*, *op., cit.*, hlm. 406

⁸ Abdur Rozaki, *Pemilu 2004 Madura: Pertarungan Ideologi Kiai, Kerabat, dan Uang*, IRE'S Insight Working Paper, Februari 2008.

Kiai masih amat dominan. Ini dapat diklarifikasi pada hasil pemilu di tahun 1999, dimana mesin politik partai yang berbasis Kiai begitu mudah mendulang suara warga sambil memanfaatkan kebencian warga pada Golkar.

Mesin politik partai dengan platform Islam dan memasang figur Kiai memanfaatkan kedekatan kultural antara kiai dengan umat atau warga yang dapat dilihat dengan sangat mudah dari segi jumlah institusi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan publik. Apakah itu dalam bentuk aktivitas keagamaan kemasjidan, diba’an, yasinan, sholawatan, dan tahlilan, serta pengajian dari tingkat anak-anak hingga dewasa; ibu-ibu dan bapak-bapak. Begitu pula dengan aktivitas keagamaan yang bersifat hajatan keluarga, seperti selamatan, selalu menyertakan kiai di dalamnya. Kesemua media keagamaan itu mempertebal rasa ikatan ideologis antara kiai dengan umat atau warga dan dengan sangat baik dilihat sebagai peluang masuknya Kiai ke dalam politik karena ketersediaan dan kekuatan akses kultural-sosiologis. Aktivitas keagamaan tersebut berkembang di setiap RT, dusun, desa, bahkan meluas hingga pada tingkatan lintas desa dan kabupaten.

Terlebih di masa kejayaan Golkar, mayoritas kiai di Madura ini mengambil jarak dengan kekuasaan dan membangun orientasi sosial keagamaan sepenuhnya pada masyarakat.⁹ Praktis kelompok kepentingan yang dominan bermain dalam Pemilu 1999 yang lalu hanya Golkar dan mesin-mesin politiknya berhadapan dengan “partai kiai”, yakni PKB, PPP dan PNU (Partai Nahdlatul Ummah) yang gagal memenangkan wakilnya karena tidak cukup memperoleh dukungan suara pemilih. Ideologi kiai menjadi wacana tanding yang secara diametral menantang posisi Golkar kala itu. Di tengah suasana kebebasan politik pada Pemilu 1999, bandul politik Madura membuat Golkar dijauhi oleh publik pemilih. Preferensi politik publik meninggalkan pola konvensional dan beralih pada preferensi dominan yang memilih partai dengan ideologi Kiai; PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PNU (Partai Nahdlatul Ummah).

Setelah lima tahun rezim kiai memimpin tampuk pemerintahan di sebagian besar kabupaten yang ada di Madura, rasionalitas publik telah memiliki indikator sekaligus ukuran-ukuran yang mampu menilai dan mengevaluasi capaian kinerja penguasa lokal. Rasionalitas tersebut diakumulasi oleh dan dari pengalaman politik publik sendiri. Publik

⁹ *Ibid.*

sudah mulai mampu menilai manajemen pemerintahan yang dijalankan.

Dalam penilaian itu, sikap kritis mulai ditunjukkan, bahwa hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menciptakan perubahan kesejahteraan rakyat antara di masa rezim Golkar dan di masa rezim Kiai. Laporan Abdul Rozaki memperlihatkan kegelisahan publik yang secara sangat rasional memperbandingkan rezim lama dengan rezim baru, bahwa petani tidak bisa mendapatkan hasil panen yang bagus karena tidak ada upaya memperbanyak saluran irigasi di areal persawahan mereka yang kering kerontang di musim kemarau; potensi sektor perikanan laut dibiarkan terlantar tanpa ada upaya pengembangan secara sistematis. Padahal Madura dikelilingi lautan dengan aneka kekayaan laut atau pantai yang, bila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat. Demikian pula dengan buruknya sektor pelayanan publik yang membuat beban rakyat makin bertambah, dan seterusnya.¹⁰

Momentum politik pemilukada sebagai revitalisasi demokrasi di tingkat lokal secara tidak terduga telah membuat akselerasi kelompok-kelompok kepentingan dapat tumbuh subur dan memperketat margin kontestasi politik dalam level mana pun di manapun kompetisi politik tersebut berlangsung.¹¹ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, perubahan sistem pemilihan umum secara nasional maupun lokal yang memberikan peluang partisipasi penuh di tingkatan publik dalam menentukan caleg pilihannya. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, sebagai misal pemilu di tahun 1999, publik hanya memilih tanda gambar dan caleg ditentukan oleh para elite partai.

Kedua, perubahan di tingkat sistem pemilu ini membuat warga yang memiliki kapital dan jaringan kekerabatan ikut serta mengambil bagian dengan cara masuk menjadi aktivis partai peserta pemilu dan ikut meramaikan kompetisi dengan menjadi caleg dan simpatisan. Ketiga, tiadanya perubahan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat dari hasil (produk) Pemilu 1999. Meskipun mayoritas kiai menguasai parlemen daerah, kondisi sosial yang dialami oleh warga dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Penggunaan istilah 'kelompok kepentingan' disini diinspirasi oleh Gabriel A. Almond, *"Interest Group and Interest Articulation"* dalam Gabriel A. Almond (ed.) *Comparative Politics Today: A World View*. (Boston: Little, Brown and Company, 1974). Menurut Almond, kelompok kepentingan adalah setiap kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik tanpa, pada saat yang sama, berkeinginan untuk memperoleh jabatan publik.

Data empirik dapat disitir disini untuk beberapa keperluan sebagai berikut. Di sektor pertanian, kekeringan persawahan rakyat dibiarkan terlantar tanpa ada solusi. Begitu pula dengan kekeringan untuk konsumsi air minum di desa-desa pedalaman hanya dipecahkan dengan cara-cara karitatif, yakni dengan mengedrop truk tangki air pada warga. Bukannya solusi yang berangkat dari akar masalah. Demikian pula halnya di sektor kelautan, seperti yang dialami oleh para nelayan, dan kerajinan ekonomi rakyat, sektor perdagangan perkapalan dibiarkan tanpa ada upaya mencari solusi atas problem yang dialami oleh mereka semuanya. Sedangkan kehidupan yang dialami oleh para dewan, sangat kontras dengan kenyataan yang dialami oleh warga.

Para dewan dengan kerja yang sedikit, fasilitas dan jaminan kesejahteraannya amat cukup mewah dan menggiurkan. Grenengan di kalangan warga, terungkap dalam kalimat berikut, “Menjadi anggota dewan selalu diliputi suasana gembira, bahagia dan jauh dari kesedihan dan penderitaan,” ungkap seorang pengungsi korban kerusuhan etnis di Sampit Kalteng yang kini menjadi tukang becak di pasar.

Keempat, munculnya kesadaran kritis, rasional tetapi juga secara sekaligus pragmatis di tingkatan publik, kesadaran kritis mereka yang menginginkan adanya perubahan. Bahwa menjadi anggota dewan merupakan peluang dan kesempatan untuk menciptakan perubahan memperkuat dan memperbaiki kehidupan publik secara umum. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kesadaran pragmatis, menjadi anggota dewan berarti memperoleh status dan mendapat peluang untuk melakukan akumulasi kapital, seperti umumnya yang dialami oleh mayoritas anggota dewan sebelum ini.

C. Birokrasi Lokal dan Kiai: Kasus Sumenep dan Pamekasan

Contoh kasus Sumenep cukup menarik dan seharusnya diulas disini. Kendatipun telah menjadi Bupati, pimpinan pemerintahan Sumenep tetap saja tidak meninggalkan kebiasaan mengajar kitab di Pondok Pesantrennya. Pemosisian semacam ini terang-benderang mengaburkan, bahkan meleburkan, nuansa religio-kultural ke dalam politik-formal. Pada bagian ini secara bergantian akan diulas lebih jauh mengenai bagaimana dinamika birokrasi dan Kiai di dalamnya, dalam konteks spesifik Sumenep dan Pamekasan.

Motivasi dari Kiai untuk terjun ke dalam ranah politik—sesuatu yang diasumsikan sangat berbeda dari lingkungan awal dimana subjek berada—adalah hal yang pertama dapat diajukan untuk menyediakan

pilihan peneliti dalam menentukan posisi awal dan menyusun peta dinamika politik antara Kiai dan Birokrasi. Bupati Sumenep, Busyro karim memberikan komentar atas penilaian serta idealisasi dan hubungan antara Kyai dan status politik menjadi Bupati sebagai berikut:

"...Jadi, Bupati itu bukan persoalan Bupati Kyai atau tidak, persoalannya mampu atau tidak. Itu saja...Kalau tentara pintar dia bisa jadi Bupati. Tapi kalau tentara bodoh, apa dia harus jadi Bupati."¹²

Sampai sini terlihat bagaimana rasionalitas politik dibangun sedemikian rupa oleh pemimpin agama. Pernyataan Bupati Sumenep yang menyatakan asas kualifikasi sebagai yang paling utama dalam persoalan kontestasi politik patut digarisbawahi tebal-tebal. Kualifikasi kemampuan yang menentukan layak-tidaknya seorang calon pemimpin untuk memimpin daerahnya adalah input penting untuk melakukan redefinisi atas rasionalitas kepemimpinan pemimpin berbasis agama. Selama ini, rasionalitas semacam itu dianggap "berbeda wilayah"—untuk menghindari terminologi "bertentangan"—dengan tradisi Islam pesantren. Kontestasi politik sudah pasti bukan saja tidak dikenal, melainkan juga sangat dihindari karena dengan dipraktikannya suatu persaingan, maka itu berarti menghapus legitimasi ke-kyai-an yang semestinya tidak lagi dapat dibantah apalagi disaingi.

Rasionalitas ini tampaknya menguasai pemahaman Kiai yang bersangkutan dalam mempersiapkan pergeseran dan penambahan status kepemimpinan: dari kepemimpinan pondok pesantren bertambah atau bergeser menuju kepemimpinan dalam konteks administrasi pemerintahan, sesuatu yang sangat berbeda secara kualitatif dengan model kepemimpinan yang pertama.

Sebagaimana data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan bupati Sumenep, didapatkan suatu persepsi politik yang unik atas peranan dan fungsi atau kedudukan dari bupati oleh diri bupati itu sendiri. Posisi politik Bupati dipersepsi sebagai semata-mata sebagai fungsi manajer, dalam hal ini ada kesan peng-eksklusi-an dimensi politik dari kedudukan manajer itu sendiri.

Dengan itu, sesungguhnya ingin dikatakan bahwa persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh bupati hampir-hampir mirip dengan persoalan administratif, sebagaimana dikesankan oleh terminologi manajer tersebut, sementara persoalan kepemimpinan dalam

¹² Wawancara penulis dengan Busyro Karim, hari Rabu tanggal 11 Mei 2011

hubungannya dengan silang sengkabut kepentingan yang demikian kompleksnya dikesampingkan. Ingin pula dikatakan bahwa dengan kedudukan manajer, maka itu berarti sudah tak ada lagi eksklusifitas posisi bupati bagi sekelompok kalangan tertentu, sehingga siapapun, termasuk kyai, sebetulnya memiliki peluang yang sama selama fungsi manajer dapat dijalankan dengan baik.

Persepsi Bupati atas fungsi manajer di atas juga menyiratkan persamaan antara pekerjaan pemerintahan dengan pekerjaan pondok pesantren, dimana keduanya sama-sama mengandalkan prinsip manajerial dan kemampuan untuk mengatur sebagaimana manajer. Dengan kata lain, ingin dimaksudkan ketiadaan distingsi antara manajer di satu tempat dengan manajer di tempat lain. Persoalan tempat dan waktu (*locus-tempus*) tidak dihitung sebagai suatu soal yang terlampau serius karena keduanya memiliki pokok hal yang sama dalam konteks manajer.

Ini hampir pasti suatu psikologi politik yang datang dari simplifikasi atau penyederhanaan fungsi. Senantiasa dibutuhkan prosesi transisi yang panjang-pendeknya bergantung pada kekuatan dan kemampuan adaptasi subjek, bukan semata-mata datang dari kemampuan dasar manajerial secara umum. Terang benderang bahwa pengalaman dalam konteks manajerial politik tidak mungkin didapatkan dalam sekali malam; ia datang dari pelbagai variasi yang salah satunya dihimpun dan diakumulasi melalui rangkaian pengalaman politik yang telah dilalui. Pengalaman itu dapat diartikulasikan dalam bermacam-macam bentuk dan status politik, dari kepartaian politik praktis hingga aktifisme politik. Yang pertama lebih mewujud dalam bentuknya yang bersifat struktural; sementara yang kedua lebih bisa dimaknai diluar sistem dan bertitiktolak pada independensi politik dari tendensi kekuasaan formal-struktural.

Titik pentingnya adalah pertemuan antara kesadaran politik dengan tuntutan politik. Jadi, dilihat sini, darimana datangnya kesadaran politik semacam itu dari kepala seorang Kiai yang menjadi Bupati? Keraguan peneliti ini terjawab dengan sendirinya pada verifikasi atas rekam jejak Bupati Sumenep saat ini, terutama dalam hubungannya dengan lingkungan politik. Bupati Sumenep telah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Sumenep selama dua periode berturut-turut. KH Abuya Busyro Karim adalah ketua DPRD Sumenep dalam dua periode (1999-2004 dan 2004-2009). Dari ini saja telah jelas dengan sendirinya jika pengalaman politik sebagai anggota dewan, ditambah kemampuan manajerialnya sebagai pemegang komando tertinggi di gedung dewan, merupakan modal politik paling utama sehingga persoalan adaptasi dan

keraguan lainnya atas pola kepemimpinannya hampir pasti pupus.

Tampak pula kesadaran penuh untuk menggeser secara perlahan personifikasi pesantren pada diri Kyai yang acapkali timbul. Permasalahan ini memang lebih banyak dialami oleh tipe manajemen pondok pesantren sebagai salah satu institusi sosial yang secara tradisional masih menyandarkan mekanisme citra dan performanya hanya pada sosok atau figur seorang atau beberapa orang. Kepemimpinan kharismatis—kalau tipologi Weberian dapat dipinjam disini—adalah tipikal yang amat cocok jika diperbandingkan pada kasus di atas. Implikasi kultural yang ditimbulkan oleh tipikal ini adalah despotisme dan kepatuhan yang luar biasa dari santri dan masyarakat sekitar atas Kyai yang bersangkutan. Kalau dilakukan suatu transformasi kondisi dari kultural ke politik, maka despotisme dan ketundukan tersebut (*political obedience*) juga dengan sangat kasat mata dilihat pada momentum politik.

Kepatuhan terjadi tatkala mobilisasi suara secara praktis dapat dikerjakan dengan mudah sambil mengandalkan status sosial dan memanfaatkan religiusitas masyarakat. Maka, kharisma yang berpendar melalui sosok Kiai itu berpindah tempat dari kharisma kultural-sosial-religius dalam perpaduan interaksi internal dan eksternal pondok pesantren, menuju kharisma politik dengan ukuran bahwa semua preferensi politik yang dijalani oleh Kiai membawa pengaruh domino kepada masyarakat untuk mengikuti preferensi atau pilihan sikap politik yang serupa dengan Kiai.

Dalam kasus Bupati Sumenep, Busyro Karim memiliki ancangan posisi yang sangat strategis dan penting, sekurang-kurangnya ditinjau dari perspektif dinamika sosial-politik lokal Madura. Keuntungan statusnya dibentuk oleh historisitas yang membuatnya didaku sebagai tokoh yang demikian penting dalam konstelasi sosial di Madura. Kakek buyut Kiai Busyro dicatat sebagai menantu cicit Kiai Ali Brambang, seorang ulama besar yang juga cucu Pangeran Katandur. Dengan demikian, Busyro masih keturunan ke-10 dari Pangeran Katandur, sebagai cucu Sunan Kudus, salah satu Wali Songo.¹³ Genealogi darah yang merujuk pada golongan tinggi dalam level status sosial sudah menjelaskan dengan sendirinya asal-usul modal sosial yang dimiliki oleh Busyro. Latar kesejarahan sedemikian rupa itulah yang menjadi salah satu variabel sangat krusial untuk menciptakan pengaruh.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) atau pemilu di

¹³ Periksa <http://kabarmadura07.blogspot.com/2008/08/kiai-busyro.html> diakses terakhir 01/06/2011

tingkatan legislatif maupun eksekutif (presiden) menyiratkan dugaan yang sangat kuat determinasi besar Kiai yang memerankan sekaligus dua sosok berikut: sosok kharismatis dan sosok pemimpin mesin politik secara bersamaan. Sampai sini, tak perlu eksplorasi terlampau jauh untuk sekedar memberikan data atas postulat barusan, melainkan cukup melihat bagaimana dua fenomena penting terjadi dalam Sumenep dan Pamekasan—dimana keduanya dikuasai oleh Bupati terpilih belakangan Kiai.

Jika demikian, maka penting dicari artikulasi modus kharismatis sebagai modal sosial tersebut dalam konteks yang sama sekali berbeda dari konteks semula dimana ia tumbuh dan berkembang: birokrasi. Sebab, disana terjadi proses transformasi, tetapi bukan sekedar transformasi bentuk dan format, melainkan juga transformasi paradigma yang jauh lebih rasional ketimbang tradisional dan konservatisme yang melingkungi kepemimpinan kharismatis. Disini, Bupati Sumenep memberikan jawabannya:

“...Tidak bisa budaya pondok itu dibawa ke birokrasi, tetapi semangatnya pondok itu yang diterapkan. Di pondok rasionalitas juga tuntutan jaman. Ini sudah eranya. Kalau dulu di pondok kiai yang jadi kurikulumnya, sekarang tidak.”

Implementasi rasionalitas dalam manajemen pondok pesantren yang diasuh menjauhkan siapapun dari bayangan tradisional-konservatif yang banyak diasosiasikan kepada pondok pesantren beserta kyainya. Adopsi rasionalitas ini harus dibedakan lebih dulu dengan sekularitas, bukan saja karena keduanya memiliki landas-tumpu (*episteme*) yang berbeda, melainkan karena banyak dikeliru-mengerti selama ini. Kesesatan dengan mengatakan bahwa rasionalitas tidak diijinkan dalam tradisi pondok pesantren dapat dibantah karena rasio dalam perspektif dogmatik agama tetap dipentingkan sebagai filter kognitif yang bahkan dipersyaratkan untuk mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Statemen Bupati di atas mengisyaratkan integrasi antara rasionalitas dan tradisionalitas pondok pesantren karena zaman memang menghendaki dan menuntutnya. Artinya, rasionalitas pun tidak lagi dapat dilihat hanya monopoli dari term-term birokrasi dan politik secara umum, melainkan juga institusi yang bahkan telanjur dipersepsi sangat kolot dan tradisional semisal pondok pesantren. Maka, harus pula dilakukan interpretasi ulang bahwa proses pergeseran dan adaptasi dari ulama menjadi umara’ bukanlah proses perpindahan dari satu dunia ke dunia

lain dalam hubungan yang *mutually exclusive* atau berbeda sama sekali. Antara pondok pesantren atau institusi agama dengan dunia politik rupanya tak lagi dapat dilihat sebagai dua entitas yang benar-benar terpisah bahkan kontradiktif. Sebab, sebagaimana ditunjukkan oleh narasumber penelitian ini, rasionalitas yang telah dipraktikkan dalam manajemen pondok pesantren rupanya membantu untuk melakukan rasionalisasi yang sama dalam praktik politik. Dengan demikian, maka kedua entitas disana, baik agama maupun politik, bukanlah dua hal yang terpisah karena didapati irisan-irisan yang cukup signifikan untuk menjelaskan proses adaptasi itu sendiri.

Ini dimengerti dengan baik oleh Bupati Sumenep guna mengatasi kegagalan adaptasi yang lebih banyak dikarenakan ketidakmampuan meredefinisi status tradisional dan kemampuan untuk menciptakan irisan antara model kepemimpinan tradisional dalam lingkungan baru birokrasi rasional.

Budaya-budaya tradisional yang dibawa masuk ke dalam dunia politik dapat juga dilihat sebagai salah satu variabel dalam dinamika pergeseran ulama menuju umara dalam konteks kepemimpinan politik. Perubahan dan modifikasi situasi politik sebagai akibat masuknya budaya dan tradisi merupakan implikasi yang paling banyak dilihat oleh peneliti. di Sumenep, terlihat jelas pergeseran kultur birokrasi politik tatkala atribut-atribut ritus keagamaan disertakan dan diformalisasikan dalam lingkungan pemerintahan. Pengaruh kepemimpinan menjadi penting dengan sendirinya karena dengan itulah terjadi perubahan kultural dalam lingkungan birokrasi yang sedang atau telah dia pimpin.

Artikulasi budaya di dalam dunia politik yang paling jelas dapat dilihat dari implementasi nilai-nilai Islam—dan atau pondok pesantren—kedalam birokrasi rasional. Dalam konteks Kabupaten Sumenep, pada tiap-tiap rapat atau pertemuan antara pejabat teras, Bupati Sumenep membuka sambutan sekaligus juga memimpin doa, suatu hal yang dalam birokrasi manapun dapat digolongkan sebagai kondisi budaya politik yang unik—untuk tidak mengatakan satu-satunya. Bahkan, artikulasi yang paling menarik adalah ketiadaan perbedaan jadwal mengajar di pondok pesantren.

Sebagaimana diketahui, sebagai pengasuh pondok pesantren, Bupati Busyro masih mempertahankan aktifitas pengajaran di pondok pesantren dengan jadwal yang sama sekali tidak berubah, melainkan justru tetap kendati pun pergantian statusnya menjadi umara' seyogianya membutuhkan modifikasi jadwal acara di sana sini karena kesibukan birokrasi.

“Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”

Kiai juga digunakan sebagai jaminan status sosial yang mampu meredam risiko konflik di lapangan dalam konteks pemilukada. Sebagaimana disampaikan sendiri oleh Bupati Pamekasan, ketegangan politik yang tinggi dan friksi kelompok-kelompok politik dalam pemilukada Pamekasan berhasil ditekan oleh jejaring kiai yang ikut mengawal. Dalam pada itu, maka tampak bagaimana Kiai menjadi variabel yang sangat penting dalam hubungannya dengan resolusi konflik politik.

Hal yang sama juga terjadi pada Bupati Sumenep. Keterangan Kepala Bagian umum Pemda Sumenep menerangkan rekam jejak historis dari Busyro ketika masih memegang kendali Ketua DPRD Sumenep. Dalam gedung dewan, komposisi 45 anggota dewan, dimana 90 persen lebihnya adalah kiai memunculkan kesan pada siapapun untuk berpikir bahwa kepiawaian Busyro dalam meredam egoisme politik dan pengaruh kultural masing-masing anggota adalah sesuatu yang hampir-hampir mengejutkan dan mencengangkan.

Berikut adalah matriks guna memudahkan interpretasi data lebih lanjut:

Matriks Data Informan (Manuscript in progress)

Data Informan		Kesimpulan	Abstraksi
Busyro Karim (Bupati Kabupaten Sumenep)	“Jadi Bupati itu bukan persoalan Bupati Kyai atau tidak, persoalannya mampu atau tidak. Itu saja...Kalau tentara pintar dia bisa jadi Bupati. Tapi kalau tentara bodoh, apa dia harus jadi Bupati.”	Pernyataan Bupati Sumenep menyatakan asas kualifikasi sebagai yang paling utama dalam persoalan kontestasi politik	Munculnya model rasionalitas politik dari tipe kepemimpinan yang juga rasional dengan penekanan pada asas kualifikasi kemampuan yang menentukan layak-tidaknya seorang calon pemimpin untuk memimpin daerahnya adalah input penting untuk melakukan redefinisi atas rasionalitas kepemimpinan
		Sedikit-banyak	

	<p>"Tidak bisa budaya pondok itu dibawa ke birokrasi, tetapi semangatnya pondok itu yang diterapkan. Di pondok rasionalitas juga tuntutan jaman. Ini sudah eranya. Kalau dulu di pondok kiai yang jadi kurikulumnya, sekarang tidak."</p> <p>"Jabatan Bupati tidak mengganggu jadwal mengajar saya dan kurikulumnya, saya juga membuka sambutan sekaligus juga memimpin doa dalam tiap-tiap rapat."</p>	<p>ingin dikemukakan disana bahwa tidak mustahil diciptakan suatu integrasi antara pondok pesantren dan birokrasi, sekalipun keduanya tidak dapat saling menggantikan satu sama lain.</p> <p>Pergeseran kultur birokrasi politik tatkala atribut-atribut ritus keagamaan disertakan dan diformalisasikan dalam lingkungan pemerintahan.</p>	<p>pemimpin berbasiskan agama.</p> <p>Mengisyaratkan integrasi antara rasionalitas dan tradisionalitas pondok pesantren karena zaman memang menghendaki dan menuntutnya. Artinya, rasionalitas pun tidak lagi dapat dilihat hanya monopoli dari term-term birokrasi dan politik secara umum, melainkan juga institusi yang bahkan telanjur dipersepsi sangat kolot dan tradisional semisal pondok pesantren.</p> <p>Pengaruh kepemimpinan menjadi penting dengan sendirinya karena dengan itulah terjadi perubahan kultural dalam lingkungan</p>
--	---	---	--

“Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”

		Kebesaran status dan Ke-Kiai-an dari Kiai Busyro menentukan persepsi politik dari lawan maupun partner politiknya atas performa Busyro itu sendiri	birokrasi yang sedang atau telah dia pimpin. Artikulasi budaya di dalam dunia politik yang paling jelas dapat dilihat dari implementasi nilai-nilai Islam— dan atau pondok pesantren— kedalam birokrasi rasional.
Kepala Bagian umum Pemda Sumenep	“Dalam gedung dewan, komposisi 45 anggota dewan, dimana 90 persen lebihnya adalah kiai, Kiai Busyro membuktikan diri mampu mengendalikan egoisme anggotanya yang juga sama-sama Kiai”		Kiai menjadi variabel yang sangat penting dalam hubungannya dengan resolusi konflik politik dalam lingkungan politik yang rasional.
Bupati Pamekasan, Kholilurrahman	“Setiap Bulan selalu Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengadakan ritual keagamaan, seperti istighosah atau pengajian di pendopo.”	Upaya memasukkan dimensi tradisi dan penyesuaian atas latar belakang dari Bupati terpilih.	Integrasi birokrasi yang rasional dengan dimensi budaya keagamaan yang tradisional. Ini perwujudan dari proses-proses pertemuan dan pergeseran antara kepemimpinan

	<p>"Kami melakukan istighosah akbar untuk memperlihatkan bahwa di Pamekasan konflik bisa diredam dengan baik."</p> <p>"Setiap minggunya ada safari jumat untuk harmonisasi aparat."</p>	<p>Pemanfaatan dimensi pemimpin agama dengan membawa serta perangkat ritus agama seperti istighosah digabungkan ke dalam dinamika politik dengan tujuan untuk meredam potensi dan risiko konflik politik baik horizontal maupun vertikal.</p> <p>Pemilihan hari jumat tentu saja bukanlah suatu <i>lapsus linguae</i>, silap lidah atau kebetulan belaka, melainkan untuk menanamkan nuansa religius hari jumat kepada seluruh SKPD.</p> <p>Hal ini berbanding lurus dengan prestasi Pamekasan sebagai kabupaten yang pernah</p>	<p>tradisional dengan segala artefak dan bawaan budaya tradisionalnya, dengan kepemimpinan modern.</p> <p>Penggunaan instrumen tradisional untuk menjinakkan rasionalitas birokrasi dan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek menunjukkan kematangan dalam mengelola batas-batas sekaligus menciptakan irisan-irisan antara dunia tradisional Kiai dengan dunia modern dari birokrasi.</p> <p>Fungsi tradisi dan transplantasi budaya kepada birokrasi untuk menyelesaikan sekaligus mengantisipasi</p>
--	---	--	---

“Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”

	<p>“Pada periode pemilukada, potensi dan ketegangan masyarakat sangat tinggi, karena perpecahan itu justru karena perbedaan di kalangan Kiai sendiri.”</p>	<p>mendapatkan penghargaan sebagai wilayah dengan manajemen risiko konflik yang sangat baik.</p> <p>Ingin ditegaskan disini suatu persepsi bahwa Kiai memiliki potensi negatif, terutama jika dikaitkan dengan fanatisme masyarakat atas semua pernyataan Kiai dan menurutnya tanpa kecuali.</p>	<p>konflik dan risiko-risikonya.</p> <p>Persepsi yang demikian menunjukkan psikologi politik dari seseorang yang datang dari latar belakang birokrasi rasional yang memandang bahwa Kiai dan segala fanatisme atasnya menyimpan bibit masalah yang memerlukan manajemen risiko yang ditimbulkannya. Itulah sebabnya integrasi atas budaya-tradisi ke dalam birokrasi rasional-modern diperlukan</p>
--	--	--	---

			sebagai jembatan untuk menengahi risiko sebagaimana disebut di atas.
--	--	--	--

D. Konsolidasi dan Mutasi Politik

Pasca terpilih menjadi Bupati untuk Kabupaten Pamekasan, Kholilurrahman membangun konsolidasi dengan menempatkan dan menyisakan peluang bagi beberapa pihak untuk beberapa posisi politik. Kecenderungan ini secara normal adalah kondisi yang hampir-hampir dapat digolongkan sebagai kondisi alamiah bagi pemimpin politik dalam rangka melakukan kerja-kerja akomodasi atas kepentingan politik dan faksi-faksi lokal.

Nyaris tidak dapat dihindari suatu respons negatif yang menafikan kepentingan kelompok-kelompok ini, terutama jika harus dihubungkan dengan dukungan dan legitimasi yang diperlukan oleh pemimpin lokal untuk mendukung stabilitas pemerintahannya dari guncangan dan konflik horizontal hingga konflik vertikal. Besar-kecilnya nuansa konflik itu dapat menyimpan potensi sekaligus risiko yang mampu mengguncang stabilitas pemerintahan, mengganggu program-program kebijakan, serta pada gilirannya mengganggu kepentingan performa politik yang ingin ditunjukkan pemimpin kepada rakyatnya demi kepentingan yang lain lagi, yakni pencitraan politik.

Sistem politik yang rasional dalam kepentingan *power sharing* yang membuat dan memberlakukan hukum wajib bagi akomodasi politik. Rasionalitas politik yang demikian inilah yang sebagian besarnya menguasai tindakan atau peristiwa politik di lingkungan birokrasi untuk tak pernah lepas dari kepatuhan atas hukum akomodasi politik. Sekarang soalnya, apakah dalam kasus dua pemimpin daerah di dua kabupaten, Pamekasan dan Sumenep, didapati peristiwa serupa yang mengharuskan keduanya atau salah satunya menerapkan strategi akomodasi politik? Dan jika iya, apakah ada hubungannya atau tidak aksi politik tersebut dengan status kepemimpinannya sebagai Kiai?

Peneliti akan coba memberikan perhatian terlebih dahulu kepada Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan, Kholilurrahman memiliki latar belakang dukungan politik dari lebih dari satu mesin politik partai. Jalanan koalisi politik semacam ini sudah sangat jelas berimplikasi pada dinamika politik di masa depan yang akan dibagi antara faksi-faksi koalisi. Koalisi

tersebut pada mulanya lahir dari dan tuntutan atas heterogenitas ekspektasi dan demografi publik. Di dalam sebuah masyarakat yang sedang mengalami transisi dari sebuah masyarakat tradisional ke dalam sebuah masyarakat modern, akan terjadi berbagai macam benturan, baik sosial, kultural, ekonomi, politik dan juga benturan-benturan kepentingan yang lain diantara berbagai kelompok yang menjadi konstituen politik masyarakat tersebut. Garis bawah tebal harus diarahkan pada tesis bahwa bibit dan tuntutan dari koalisi politik datang dari transisi dan transposisi kondisi tradisional menuju modern.¹⁴

Benturan-benturan ini akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap tatanan kehidupan didalam masyarakat politik yang heterogen apabila dibandingkan dengan benturan-benturan kepentingan yang terjadi didalam masyarakat politik yang lebih homogen. Benturan-benturan yang demikian menciptakan suatu proses yang dikenal dengan istilah proses politik dimana setiap kelompok kepentingan yang ada didalam masyarakat tersebut berusaha keras untuk memberikan pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah serta berusaha untuk mempengaruhi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ada.

Lemahnya institusionalisasi politik yang terjadi di dalam masyarakat transisi dalam menghadapi berbagai macam benturan kepentingan yang terjadi akan menimbulkan sebuah krisis stabilitas terhadap tatanan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu cara atau sarana untuk memperlancar keseimbangan proses politik yang terjadi didalam masyarakat transisi ini. Dari sinilah kemudian muncul gagasan pembentukan partai politik beserta mekanisme koalisi politik yang bertugas untuk menjaga keseimbangan kepentingan politik dan stabilitas politik dari situasi heterogenitas tersebut.

Berlakunya hukum koalisi berarti juga berlakunya hukum permintaan dan penawaran serta kontrak politik yang telah disepakati. Pemberian posisi strategis kepada kawan dalam satu kapal koalisi biasanya dinilai sebagai bagian untuk imbal jasa demi melancarkan konsolidasi koalisi. Indikasi yang dengan mudah dapat dilihat dari bentuk konsolidasi dan pembagian posisi tersebut terekam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di beberapa daerah. Pemilukada

¹⁴ Ahmad Qisa'i, *Koalisi Politik: Refleksi Politik Masyarakat Heterogen*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar sehari PPI India di New Delhi Bulan Oktober 2004, tidak diterbitkan.

tersebut berimplikasi pada perubahan skema dan posisi dari perangkat daerah. Sejumlah Kepala Daerah selesai dilantik langsung melakukan mutasi, besar maupun kecil, untuk memberikan tempat bagi partner koalisi yang telah bergabung.

Dalam posisi itulah peneliti melihat konflik vertikal yang terjadi antara Sekretaris Daerah dan Bupati terpilih dalam kasus Pamekasan. Sekretaris Daerah (Sekda) pada periode sebelum Bupati Kholilurrahman memimpin, Dr Djamaluddin Karim, tanpa tedeng aling-aling dimutasi tanpa pertimbangan rasional yang menurutnya bisa diterima. Djamaluddin akhirnya resmi menggugat Bupati Pamekasan Kholilurrahman ke jalur hukum melalui PTUN atas kebijakan memberhentikan dirinya pada tahun 2009 lampau sebagai bentuk perlawanan hukum.¹⁵

Alasan standar dari suatu mutasi pejabat di awal kepemimpinan kepala daerah usai dilantik disamping pelanggaran atau ketidakpuasan pemimpin baru atas pejabat yang bersangkutan, juga untuk mempercepat tercapainya tujuan atau mewujudkan visi-misi, program kerja, atau janji-janji ketika masa kampanye pilkada. Kepala daerah mempunyai keyakinan bahwa salah satu kunci keberhasilan yang paling mujarab untuk merealisasikan program kerja adalah dengan resep program mutasi.

Secara agak normatif dapat dikemukakan disini bahwa kondisi pengutamaan mutasi tanpa pertimbangan yang masuk akal tersebut sangat rentan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau masalah politik lebih mendominasi perjalanan pemerintahan, dipastikan cara pengelolaan birokrasi rasional akan memakan dirinya sendiri karena mutasi semacam itu juga merusak daya guna dari suatu sistem dan prosedur politik yang telah terbentuk.

E. Kesimpulan

Pergantian rezim orde baru ke era reformasi berimbas pada pergeseran kepemimpinan Kyai di Madura. Melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sejumlah Kyai pengasuh pesantren terjun ke dunia politik dan menjadi kontestan pemilihan Bupati. Dalam *event* Pemilukada ini tersirat adanya dugaan yang sangat kuat determinasi besar Kiai yang memerankan sekaligus dua sosok secara bersamaan, yaitu sosok kharismatis dan sosok pemimpin mesin politik. Ini dapat tergambarkan secara jelas dalam dua fenomena penting di Kabupaten Sumenep dan

¹⁵ <http://regional.kompas.com/read/2009/11/12/10232896/sekda.nonaktif.ptun-kan.bupati.pamekasan> diakses terakhir pada 18 Juni 2011.

Pamekasan yang menempatkan sosok Kiai kharismatik sebagai kepala daerah terpilih (Bupati). Modus kharismatis sebagai modal sosial jelas berbeda dengan konteks birokrasi yang sebelumnya sangat asing bagi para Kyai. Di sinilah terjadi transformasi dan pergeseran paradigma kepemimpinan para Kyai. Betapa pun budaya pondok pesantren tidak bisa dibawa begitu saja ke kancah birokrasi, tetapi semangat kebersahaannya coba diadopsi untuk bisa diterapkan di lingkup birokrasi. Impelementasi rasionalitas dalam manajemen pondok pesantren sebagai habitat Kyai kini mulai diterapkan. Adopsi rasionalitas ini harus dibedakan lebih dulu dengan sekularitas, bukan saja karena keduanya memiliki landas-tumpu yang berbeda, melainkan karena banyak dikeliru-mengertikan selama ini. Kesesatan dengan mengatakan bahwa rasionalitas tidak diijinkan dalam tradisi pondok pesantren dapat dibantah karena rasio dalam perspektif dogmatik agama tetap dipentingkan sebagai filter kognitif yang bahkan dipersyaratkan untuk mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Fenomena belakangan ini menunjukkan adanya integrasi antara rasionalitas dan ketradisional pondok pesantren karena zaman memang menghendaki dan menuntutnya demikian. Artinya, rasionalitas pun tidak lagi dapat dilihat hanya monopoli dari term-term birokrasi dan politik secara umum, melainkan juga institusi yang bahkan telanjur dipersepsi sangat kolot dan tradisional semisal pondok pesantren.

Daftar Pustaka

- Arifin, *Kepemimpinan Kyai Dalam Sistem Pengajian Kitab-Kitab Islam Klasik, Studi kasus di Ponpes Tebuireng Jombang*, Malang: Kalimasada, 1992.
- A. Hasyim Muzadi, *Membangun NU pasca Gus Dur*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Jakarta: Siepress, 1992.
- Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Darma Bakti, 1978.
- Ahmad Mansyur Suryanegara, *Menemukan Sejarah*, Bandung, Mizan, 1996.
- Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya, LPEKISS, 1999.
- _____, *Nasionalisme Kiai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

- Anies Baswedan, "Kata Pengantar" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: YOI-KITLV, 2007.
- Bisri Effendi, An-Nuqoyyah: *Gerak Transformasi Sosial di Madura*, Jakarta: P3M, 1990.
- Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992.
- _____, NU, *Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES 1995.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Denzin, Norman K., and Lincoln Y vonna S, *Handbooks of Qualitative Research*. London Sage Publication Ltd. 1994.
- Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat : Kyai Pesantren- Kyai Langgar di Jawa*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999.
- Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Geertz, Clifford.t.t."The Javanese Kiai, The Changing Role of Cultural-Broker". Dalam *Comparative Studies in Society and History*. Vol.2.
- Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- Ibn Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ilik Arifin Mansur Noor,. *Islam in an Indonesia Word: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik, Kiai Advokatif, dan Kiai Spiritual*, Disertasi tidak dipublikasikan, Surabaya: Universitas Airlangga, 1998.
- Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*, Malang: Kalimasada Press, 1992.
- Kacung Marijan, *Quo vadis NU, Setelah Kembali ke Khithah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- , *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Surabaya: Pusdeham – Eureka, 2006.
- Cendekiawan Muslim Orde Baru. Jakarta: Paramadina.
- Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- Mansur Noor, *Islam in an Indonesia Word: Ulama of Madura*, Yogyakarta:

- Gajah Mada Press, 1990.
- Manfred Ziamek, *Pesantren dan Perubahan*, Jakarta: P3M, 1986.
- Mutmainnah, *Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Madura*,” dalam Jamil Gunawan (eds.), *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Pradjarta Dirdjosanyoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta: LKis, 1999.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*, Bandung: al-Ma’arif, 1977.
- Saifullah Maksum, *KH. Abdul Wahab Chasbullah: Perintis, Pendiri, dan Penggerak Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Panitia Penulisan Biografi, 1999.
- Syamsul AH, *Kharisma Kyai As’ad Syamsul Arifin di Mata Umat*, Yogyakarta: LKis, 2003.
- Warsono. *Wacana Politik Kiai, Pada Era Pemerintahan Gus Dur, Apakah Sebagai Intelektual Organik atau Intelektual Tradisional*, Disertasi tidak dipublikasikan, Surabaya: Universitas Airlangga, 2003.
- Watt, Montgomery, *Politik Islam dan Lintasan Sejarah*, Jakarta: P3M, 1988.
- Weber, Marx, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism New York*, Scribner’s Sons. Terj.Yusuf Priyasudiarja, 2000, Etika Protestan dan Semangat Kapitalism. Surabaya: Pustaka Prometheus, . 1958.
- _____, *Sociology of Religion*, London: Bacon Press, 1963.
- _____, *Economy and Society an Out Line of Interpretive Sociology*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Ziamek, Manfred, *Pesantren Dalam Perubahan*, Jakarta: P3M, 1986.

